

---

## **PENGEMBANGAN *SUPPLY CHAIN MANAGEMENT* DALAM PENGELOLAAN DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU YANG LEBIH TEPAT JENIS, TEPAT JUMLAH DAN TEPAT WAKTU BERBASIS *HUMAN RESOURCES COMPETENCY DEVELOPMENT* DI KPU JAWA BARAT**

**Wandy Zulkarnaen<sup>1</sup>, Iis Dewi Fitriani<sup>2</sup>, Nina Yuningsih<sup>3</sup>**  
STIE Muhammadiyah Bandung<sup>1,2</sup>; STAI Tasikmalaya<sup>3</sup>  
Email : wandy.zulkarnaen@stiemb.ac.id<sup>1</sup>; iisdewi98@gmail.com<sup>2</sup>;  
Nienaya10@gmail.com<sup>3</sup>

### **ABSTRAK**

Di dunia distribusi logistik pada umumnya skema pendistribusian fisik dan efektivitas logistik akan berdampak sangat besar serta cukup signifikan terhadap kualitas kepuasan juga biaya perusahaan ataupun organisasi. Manajemen logistik menjadi sangat penting dalam pengelolaan mata rantai pasokan (*Supply Chain Management*), tujuan dari sistem logistik. Hal ini merupakan fungsi logistik utama dan kebutuhan untuk manajemen rantai pasokan terpadu yang menyeluruh

Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga pemerintah yang di dalamnya terdapat aktivitas distribusi logistik keperluan Pemilu tentunya harus dikelola dengan pengelolaan logistik secara tepat dan efektif sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pengadaan logistik dan distribusi ini memiliki peran sentral dan strategis sebagai salah satu aspek yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu, dimana proses-proses yang tercakup adalah proses perencanaan, pengadaan, pengawasan dan pendistribusian yang merupakan kesatuan manajemen logistik Pemilu yang tersistematis pelaksanaannya. Saat ini, semua proses-proses tersebut sebagian besar masih dilakukan secara manual dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas, sehingga sangat dimungkinkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait pengadaan dan pendistribusian logistik yang diakibatkan oleh kesalahan manusia (*human error*).

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan kajian implementasi metode pengelolaan logistik Pemilu secara esensial, kualitatif, dapat memberikan alternatif metode pengelolaan logistik Pemilu dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan logistik Pemilu berbasis pengembangan kompetensi SDM. Adapun Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berlandaskan jenis penelitian deskriptif analitis dengan cara mengumpulkan dan merekap data yang bukan dicatat dalam bentuk angka namun penjelasan sejelas-jelas dan sedalam-dalamnya.

Sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting. Sumber daya manusia merupakan pilar utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam upaya mewujudkan visi dan misinya. Karenanya harus dipastikan sumber daya ini dikelola dengan sebaik mungkin agar mampu memberi kontribusi secara optimal. Maka diperlukanlah sebuah pengelolaan secara sistematis dan terencana agar tujuan yang diinginkan di masa sekarang dan masa depan bisa tercapai. Untuk merealisasikan misi organisasi dalam rangka mewujudkan visi diperlukan suatu konsep yang mampu mengembangkan **kompetensi** personil. Sesuai dengan misi KPU yaitu meningkatkan

integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara Pemilu.

Kata Kunci : *Supply Chain Management*; Distribusi Logistik; Kompetensi

### **ABSTRACT**

*In the world of logistics distribution in general determines the distribution of physics and logistics planning will be very large and significant enough to the quality of satisfaction as well as the cost of the company or organization. Logistics management becomes very important in supply chain management, the goal of the logistics system. This is the main logistics and needs for complete supply chain management*

*The General Election Commission as one of the government agencies responsible for the affairs of logistics distribution needs Elections to regulate the proper and effective logistics administration in accordance with the applicable laws and regulations. This logistics and distribution procurement plays a central and strategic role as one of the aspects that determines the success of the election, in which the processes covered are the planning, procurement, supervision and distribution processes related to the management of a systematic election logistics management. At present, all of these processes are still largely carried out manually with a limited amount of human resources, so it is highly dependent on the procurement and distribution of logistics caused by human error.*

*The purpose of this research is to study the implementation of Election logistics management methods in an essential, qualitative way, to provide alternative methods of Election logistics management in an effort to improve the quality of Election logistics management based on the development of HR competencies. The method of this research uses a qualitative approach based on the type of analytical descriptive research by collecting and recapitulating data that is not recorded in the form of numbers but the explanation is as clear and profound as possible.*

*Human resources are a very important organizational element. Human resources are the main pillar as well as the driving wheel of the organization in an effort to realize its vision and mission. Therefore, it must be ensured that these resources are well managed in order to be able to make optimal contributions. So we need a planned planning and planned so that the desired goals in the present and future can be accepted. To realize the mission of the organization within the required framework, a concept that requires competence is needed. In accordance with the KPU mission, namely to increase the integrity, independence, competence and professionalism of election organizers by strengthening the election organizers' code of ethics.*

*Keywords: Supply Chain Management; Logistics Distribution; Competence*

### **LATAR BELAKANG**

Di dunia distribusi logistik pada umumnya skema pendistribusian fisik dan efektivitas logistik akan berdampak sangat besar serta cukup signifikan terhadap

kualitas kepuasan juga biaya perusahaan ataupun organisasi. Manajemen logistik menjadi sangat penting dalam pengelolaan mata rantai pasokan (*Supply Chain Management*), tujuan dari sistem logistik. Hal ini merupakan fungsi logistik utama dan kebutuhan untuk manajemen rantai pasokan terpadu yang menyeluruh

Dalam pemilihan umum, KPU merupakan penyelenggara tertinggi, dan bertanggungjawab melaksanakan fungsi electoral regulation, electoral process, dan electoral law enforcement, sebagai konsekuensi struktural. Sedangkan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS hanya melaksanakan fungsi *electoral process* (Sasangka & Zulkarnaen, 2019). Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga pemerintah yang di dalamnya terdapat aktivitas distribusi logistik keperluan Pemilu tentunya harus dikelola dengan pengelolaan logistik secara tepat dan efektif sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pengadaan logistik dan distribusi ini memiliki peran sentral dan strategis sebagai salah satu aspek yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu, dimana proses-proses yang tercakup adalah proses perencanaan, pengadaan, pengawasan dan pendistribusian yang merupakan kesatuan manajemen logistik Pemilu yang tersistematis pelaksanaannya. Saat ini, semua proses-proses tersebut sebagian besar masih dilakukan secara manual dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas, sehingga sangat dimungkinkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait pengadaan dan pendistribusian logistik yang diakibatkan oleh kesalahan manusia (*human error*).

Sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting. Sumber daya manusia merupakan pilar utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam upaya mewujudkan visi dan misinya. Karenanya harus dipastikan sumber daya ini dikelola dengan sebaik mungkin agar mampu memberi kontribusi secara optimal. Maka diperlukanlah sebuah pengelolaan secara sistematis dan terencana agar tujuan yang diinginkan di masa sekarang dan masa depan bisa tercapai. Untuk merealisasikan misi organisasi dalam rangka mewujudkan visi diperlukan suatu konsep yang mampu mengembangkan kompetensi personal. Sesuai dengan misi KPU yaitu meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara Pemilu

## Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Kajian metode pengelolaan logistik Pemilu secara esensial, kualitatif, dapat memberikan gambaran bagaimana metode pengelolaan logistik Pemilu;
- 2) Kajian implementasi metode pengelolaan logistik Pemilu secara esensial, kualitatif, dapat memberikan gambaran masalah implementasi metode pengelolaan logistik Pemilu;
- 3) Kajian implementasi metode pengelolaan logistik Pemilu secara esensial, kualitatif, dapat memberikan alternatif metode pengelolaan logistik Pemilu dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan logistik Pemilu berbasis pengembangan kompetensi SDM.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Manajemen Rantai Suplai

Manajemen Rantai Suplai (*Supply chain management*) adalah sebuah ‘proses payung’ di mana produk diciptakan dan disampaikan kepada konsumen dari sudut struktural. Sebuah supply chain (rantai suplai) merujuk kepada jaringan yang rumit dari hubungan yang mempertahankan organisasi dengan rekan bisnisnya untuk mendapatkan sumber produksi dalam menyampaikan kepada konsumen. (Kalakota, 2000)

Tujuan yang hendak dicapai dari setiap rantai suplai adalah untuk memaksimalkan nilai yang dihasilkan secara keseluruhan (Chopra, 2001). Rantai suplai yang terintegrasi akan meningkatkan keseluruhan nilai yang dihasilkan oleh rantai suplai tersebut..

Manajemen rantai suplai adalah koordinasi dari bahan, informasi dan arus keuangan antara perusahaan yang berpartisipasi. Manajemen rantai suplai bisa juga berarti seluruh jenis kegiatan komoditas dasar hingga penjualan produk akhir ke konsumen untuk mendaur ulang produk yang sudah dipakai :

1. Arus material melibatkan arus produk fisik dari pemasok sampai konsumen melalui rantai, sama baiknya dengan arus balik dari retur produk, layanan, daur ulang dan pembuangan.
2. Arus informasi meliputi ramalan permintaan, transmisi pesanan dan laporan status pesanan, arus ini berjalan dua arah antara konsumen akhir dan penyedia material mentah.

3. Arus keuangan meliputi informasi kartu kredit, syarat-syarat kredit, jadwal pembayaran dalam penetapan kepemilikan dan pengiriman. (Kalakota, 2000)

Menurut Turban, Rainer, Porter (2004), terdapat 3 macam komponen rantai suplai :

a. Rantai Suplai Hulu

Bagian *upstream* (hulu) *supply chain* meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufaktur dengan para penyalurannya (yang mana dapat manufaktur, assembler, atau kedua-duanya) dan koneksi mereka kepada para penyalur mereka (para penyalur *second-trier*). Hubungan para penyalur dapat diperluas kepada beberapa strata, semua jalan dari asal material. Dalam *upstream supply chain*, aktivitas yang utama adalah pengadaan.

b. Manajemen Internal Suplai Rantai/*Internal supply chain management*

Bagian dari *internal supply chain* meliputi semua proses pemasukan barang ke gudang yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam keluaran organisasi itu. Hal ini meluas dari waktu masukan masuk ke dalam organisasi. Di dalam rantai suplai internal, perhatian yang utama adalah manajemen produksi, pabrikasi, dan pengendalian persediaan.

c. Segmen Rantai Suplai Hilir

*Downstream* (arah muara) *supply chain* meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Di dalam *Downstream Supply Chain*, perhatian diarahkan pada distribusi, pergudangan, transportasi, dan *after-sales-service*.

### **Distribusi dan Logistik**

Secara umum Definisi Distribusi Adalah aktivitas menyalurkan produk baik barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Terdapat pengertian distribusi yang lain. Distribusi adalah aktivitas pemasaran dalam rangka memudahkan dalam penyampaian produk dari tangan produsen kepada konsumen. Fungsi distribusi pada hal ini adalah membentuk *utility* dan peralihan kepemilikan daripada suatu produk. Oleh karena itu kegiatan pendistribusian merupakan aktivitas menciptakan nilai tambah pada barang dan jasa. Nilai tambah tersebut seperti nilai kegunaan, tempat, dan waktu. Kegiatan pendistribusian biasa terjadi pada aktivitas pemasaran. Kegiatan pendistribusian menciptakan pula arus saluran pemasaran atau arus saluran distribusi.

Pada sistem distribusi, terdapat berbagai lembaga pemasaran yang terbentuk dan adanya arus informasi.

Definisi distribusi menurut para ahli adalah sebagai berikut :

1. Pengertian distribusi adalah kegiatan memindahkan produk dari sumber ke konsumen akhir dengan saluran distribusi pada waktu yang tepat (Assauri, 2004)
2. Arti distribusi adalah aktivitas menyalurkan atau mengirimkan barang dan jasa supaya sampai hingga konsumen akhir (Soekartawi, 2001).

Definisi distribusi adalah saluran pemasaran yang dipakai oleh pembuat produk untuk mengirimkan produknya ke industri atau konsumen. Lembaga yang terdapat pada saluran distribusi adalah produsen, distributor, konsumen atau industri (Basu Swastha, 2002).

Logistik merupakan salah satu aktivitas penting yang mendukung tingkat perekonomian suatu negara yang meliputi pengiriman, penerimaan, pergudangan, dan pendistribusian. Pelabuhan dijadikan sebagai salah satu pusat kegiatan logistik di Indonesia, karena bentuk geografis dari Indonesia yang berupa kepulauan. Selain itu, negara Indonesia juga terletak di jalur perdagangan internasional, yang menjadi tempat persinggahan kapal-kapal perusahaan asing. Keadaan ini membuat Indonesia berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam hal logistik. Adapun pelayanan logistik pada pelabuhan berupa kegiatan transportasi dan penyimpanan (warehouse).

### **Logistik Pemilu**

Terdapat dua jenis logistik Pemilu berupa :

1. Perlengkapan pemungutan suara, terdiri dari kotak suara, bilik suara, surat suara, tinta sidik jari, segel, alat pemberi tanda pilihan dan Tempat Pemilihan Suara (TPS).
2. Dukungan perlengkapan pemungutan,, seperti sampul kertas, formulir berita acara, tanda pengenal KPPS, lem/perekat, ballpoint, spidol, alat bantu tuna netra, karet, stiker kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, kantong plastik, gembok.

Logistik Pemilu harus terdistribusikan secara tepat baik tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu, dalam arti :

1. Tepat jenis, harus sesuai macam dan jenisnya maupun peruntukan/fungsinya.
2. Tepat jumlah, untuk logistik utama yaitu surat suara dan formulir-formulir, jumlahnya harus sesuai kebutuhan daerah tersebut.

3. Tepat waktu, penyedia barang dan jasa harus memperhitungkan waktu pelaksanaan pengadaan, penyediaan barang dan jasanya sesuai dengan jadwal.

### **Membangun SDM Berbasis Kompetensi (*Human Resources Competency Development*)**

Kompetensi dalam arti sebuah konsep yang mengandung arti untuk menggabungkan SPKJ yaitu penggabungan antara Skill (Ketrampilan), Personal's Atribut (Atribut Perseorangan), Knowledge ( ilmu pengetahuan) tercermin dari Job Behaviour (Perilaku Kinerja) yang terukur, dapat diamati sehingga dapat dievaluasi.

Kompetensi merupakan faktor yang dapat menentukan keberhasilan kinerja seseorang. Jadi titik perhatian yang utama dari sebuah kompetensi adalah perbuatan yang merupakan perpaduan dari ketrampilan, atribut perseorangan dan ilmu pengetahuan. Pemicu utama timbulnya manajemen berbasis kompetensi adalah karena adanya sebuah keinginan untuk menempatkan posisi seorang pegawai pada tempat atau jabatan yang sesuai dengan kualitas kemampuan pegawai (*The Right Man on The Right Place*).

Tujuan dari konsep Manajemen Sumber Daya Berbasis Kompetensi bertujuan untuk menghasilkan hasil akhir yang diselaraskan dengan tujuan serta sasaran perusahaan/ organisasi dengan menerapkan standar kinerja yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Adapun dalam penelitian ini, khususnya dalam membangun kemampuan mengelola distribusi logistik dengan menggunakan konsep *supply chain management*, maka jenis kompetensi yang bisa dibangun untuk SDM pengelolanya berupa :

1. Soft Competency/Kompetensi Manajerial, yakni sebuah kompetensi yang berhubungan dengan kemampuan mengelola pegawai, serta membangun hubungan dengan pihak/orang lain., seperti kemampuan untuk memecahkan masalah, kemampuan memimpin, dan kemampuan untuk membangun komunikasi.
2. Hard Competency/Kompetensi Teknis, yakni sebuah kompetensi yang berhubungan dengan kapasitas fungsional sebuah pekerjaan yang berkaitan dengan keteknisan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakoni., dalam hal ini kemampuan mengelola distribusi logistik dengan menggunakan konsep *supply chain management*.

## METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja didalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada.

### Desain Penelitian

Desain penelitian ini berlandaskan jenis penelitian deskriptif analitis dengan cara mengumpulkan dan merekap data yang bukan dicatat dalam bentuk angka namun penjelasan sejelas-jelas dan sedalam-dalamnya.

### Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah lembaga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat jalan Cianjur No.11 Bandung. Selain itu juga sejumlah Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi Jawa Barat.

### Teknik pengambilan data

Teknik pengambilan data dilakukan dengan observasi langsung ke lembaga KPU yang menjadi objek penelitian oleh peneliti sendiri dengan dibantu anggota peneliti, serta melakukan pengumpulan data/informasi terkait materi penelitian. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara tak terstruktur untuk menjangkau informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi.

### Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan direncanakan selama 1 (tahun) tahun dengan tahapan-tahapan untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan penelitian. Berikut adalah diagram alir dalam bentuk *fishbone* pada Gambar di bawah ini : (Lihat Gambar 1).

## HASIL PENELITIAN

Pemilu merupakan salah satu amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang harus dilaksanakan secara umum, langsung, bebas, rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil). Pemilu yang berkualitas dan demokratis dapat diwujudkan apabila dilaksanakan sesuai dengan asasnya. Adanya Pemilu yang berkualitas dan demokratis dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yaitu terimplementasinya prinsip-prinsip good governance berupa partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, responsif, pemerataan, visi strategik, efektifitas dan efisiensi, profesionalisme, akuntabilitas, dan pengawasan.



Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Visi KPU untuk Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL dengan salah satu misinya berupa meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara Pemilu, tentunya tidak akan lepas dari dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi unggul untuk mewujudkannya. (<https://kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/4/Visi-dan-Misi>).

Dalam Rencana strategis KPU 2015-2019 halaman 21 disebutkan bahwa Organisasi KPU memiliki sumber daya manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia, serta tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional.

Salah satu permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Pemilu yang menjadi tugas dan wewenang KPU adalah pengelolaan logistik Pemilu, baik masalah logistik fisik maupun distribusi logistiknya. Logistik Pemilu, seperti tertulis dalam banyak literatur kePemiluan adalah alat untuk mengkonversi suara menjadi kursi. Karena itu perhatian terhadap terselenggaranya manajemen logistik yang baik adalah keniscayaan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu dalam kondisi apapun. Proses pengadaan dalam siklus Pemilu meliputi pengadaan jasa dan pengadaan barang. Tidak seperti instansi lain, beberapa item barang dan jasa dalam proses Pemilu sangat spesifik, sehingga tidak semua perusahaan dapat menyediakan. Secara garis besar, proses pengadaan barang dan jasa Pemilu terbagi atas dua tahapan; pertama, logistik pada persiapan Pemilu, dan logistik pada pelaksanaan Pemilu.

Beberapa prinsip penyediaan dan pendistribusian logistik Pemilu di antaranya adalah tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, dan tepat kualitas. Berhimpitannya waktu penyelenggaraan Pemilu dengan hari besar keagamaan mayoritas penduduk di Indonesia ini harus membuat penyelenggara Pemilu lebih waspada terhadap terlanggarnya prinsip penyediaan dan pendistribusian logistik Pemilu tersebut.

Sebagai rujukan, tata kelola Logistik Pemilu yang berkaitan dengan pengelolaan pemeliharaan dan inventarisasi serata distribusi logistik Pemilu diatur oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No.1266/HK.03-kpt/07/X/2018 yang memuat yang di dalamnya mengatur pokok-pokok kegiatan

berkaitan dengan barang logistik Pemilu dan bagaimana kesiapan sumber daya manusianya dalam menjamin terdistribusikannya logistik Pemilu dengan baik.

Untuk itu sangat diperlukan satu konsep distribusi logistik Pemilu yang mampu mengelola dan memastikan mata rantai produksi dan pasokan berjalan sesuai perencanaan yang ditetapkan dalam rencana strategis KPU guna menjalankan tugas misi yang bertujuan mencapai kesempurnaan visi penyelenggaraan Pemilu. Adapun basis dari kesuksesan perhelatan penyelenggaraan Pemilu ini adalah pada kualitas kompetensi SDM di dalamnya. Sesuai dengan teori Spencer and Spencer ( 1993 ) Kompetensi SDM adalah *“Underlying characteristic’s of individual which is causally related to criterion referenced effective and or superior performance in a job or situation”* yaitu, merupakan karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Secara umum, kompetensi adalah sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), atribut personal dan pengetahuan (*knowledge*) yang tercermin melalui perilaku kinerja (*job behavior*) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi.

Supply Chain Management adalah manajemen terhadap aliran antar dan diantara tahapan supply chain untuk memaksimalkan profitabilitas keseluruhan supply chain Sejak tahun 1980-an, telah dikembangkan istilah manajemen rantai pasok (supply chain management, SCM). Istilah ini banyak digunakan, walaupun dengan beberapa kerancuan pengertian. Beberapa pihak memberikan definisi/pengertian manajemen rantai pasok sebagai berikut:

- a. Lambert (2001), menyatakan bahwa SCM merupakan integrasi atas proses-proses bisnis dari pengguna akhir melalui pemasok awal yang menyediakan produk, jasa, dan informasi yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan.
- b. Menurut Simchi-Levi (2005), SCM adalah suatu kumpulan pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan secara efisien antara pemasok, perusahaan manufaktur, pergudangan, dan toko, sehingga barang diproduksi dan didistribusikan pada kuantitas, lokasi, dan waktu yang benar, untuk meminimumkan biaya-biaya pada kondisi yang memuaskan kebutuhan tingkat pelayanan.
- c. Menurut Handfield (2013), SCM merupakan integrasi atas kegiatan-kegiatan dalam suatu rantai pasok dengan hubungan yang diperbaiki, untuk mencapai suatu keunggulan bersaing yang berkelanjutan.

d. Chopra & Meindl (2013), berpendapat bahwa SCM mencakup manajemen atas aliran-aliran diantara tingkatan dalam suatu rantai pasok untuk memaksimalkan keuntungan total.

Dalam hal pemeliharaan dan inventarisasi logistik dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya :

- a. Tahapan Penerimaan
- b. Tahapan Penyimpanan
- c. Tahapan Penyortiran
- d. Tahap Pengemasan
- e. Tahap Pemeliharaan
- f. Tahap Penyaluran
- g. Tahap Inventarisasi

Sedangkan untuk memastikan berjalannya tahapan di atas diperlukan kesiapan sumber daya manusia dalam hal ini pegawai atau perangkat struktur di bawah KPU Provinsi yang mampu melaksanakannya sesuai aturan yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan suatu langkah untuk dapat memastikan bahwa kompetensi pegawai mampu menjalankan tugas Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis *Human Resources Competency Development* Di KPU Jawa Barat. Ada beberapa langkah yang dilakukan berkaitan dengan kebutuhan pengembangan Kompetensi SDM KPU khususnya bidang garapan logistik, yaitu berupa :

- a) Bimbingan Teknis
- b) Supervisi dan Pemantauan
- c) Evaluasi dan Pelaporan
- d) Pengawasan

Dalam rangka ketersediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan di TPS secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, tepat jenis, dan tepat sasaran, maka perlu dilakukan pembinaan secara berjenjang sesuai dengan strata kelembagaan penyelenggara Pemilu. Pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis, supervisi, dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan, dengan penjelasan sebagai berikut :

#### **A. Bimbingan Teknis Bimbingan teknis dan Sosialisasi**

Bimbingan Teknis Bimbingan teknis dan Sosialisasi dilakukan secara berjenjang oleh unsur KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh dengan penjelasan sebagai berikut:

1. personel dari KPU dan Sekretariat Jenderal KPU melakukan bimbingan teknis kepada personel dari KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
2. personel dari KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan bimbingan teknis kepada personel dari KPU/KIP Kabupaten/Kota.

## **B. Supervisi dan Pemantauan**

Supervisi dan pemantauan dilaksanakan guna menjamin pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan pedoman. Supervisi dan pemantauan dilaksanakan oleh tingkat pusat dan provinsi, dengan pelaksanaan sebagai berikut: 1. Tingkat Pusat KPU melakukan supervisi dan pemantauan secara berkala kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota terhadap seluruh Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu dan Pemilihan terkait tata kelola manajemen gudang. 2. Tingkat Provinsi KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan supervisi dan pemantauan secara berkala kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota seluruh kegiatan pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan Logistik Pemilu dan Pemilihan.

## **C. Evaluasi dan Pelaporan**

Evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada tahap Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu dan Pemilihan dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dibantu oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kegiatan, kendala, hambatan, dan pemecahan masalahnya sebagai bahan pertimbangan yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Evaluasi dan pelaporan dilaksanakan di masing-masing tingkatan baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dengan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Tingkat Pusat Evaluasi dan pelaporan ditingkat pusat dilaksanakan oleh KPU, meliputi: a. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahap Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu dan Pemilihan; b. memberikan umpan balik hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahap Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu dan

Pemilihan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada tahap Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu dan Pemilihan.

2. Tingkat Provinsi Evaluasi dan pelaporan ditingkat pusat dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, meliputi: a. melakukan evaluasi kegiatan pada tahap Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu dan Pemilihan; b. memberikan umpan balik hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahap Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu dan Pemilihan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada tahap Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu dan Pemilihan.

3. Tingkat Kabupaten/Kota Evaluasi dan pelaporan ditingkat pusat dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, meliputi: a. melakukan evaluasi kegiatan pada tahap Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu dan Pemilihan; b. memberikan umpan balik evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahap Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu dan Pemilihan; dan c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada tahap Pemeliharaan dan Inventarisasi logistik Pemilu dan Pemilihan;

#### D. Pengawasan

Dalam rangka ketersediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan di TPS secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, tepat jenis, dan tepat sasaran, maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahap Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu dan Pemilihan yang berlangsung pada KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPK, PPS, dan KPPS memerlukan pengawasan yang dilakukan secara pengawasan internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dari hasil penelitian diidentifikasi komponen-komponen penunjang Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management) yang dilaksanakan untuk mengelola dan mendistribusikan Logistik Pemilu, sebagai berikut : (Lihat Gambar 2).

Adapun hasil penelitian menyimpulkan 6 tahapan pengelolaan rantai pasok Logistik Pemilu yang peneliti dapatkan, sehingga diharapkan bisa menjadi model pengelolaan Logistik Pemilu dengan menghasilkan distribusi Logistik Pemilu yang tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu yaitu : (Lihat Gambar 3).

Adapun hasil penelitian menyimpulkan 5 tahapan pengelolaan rantai pasok Logistik Pemilu yang peneliti dapatkan, sehingga diharapkan bisa menjadi model

pengelolaan Logistik Pemilu dengan menghasilkan distribusi Logistik Pemilu yang tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu yaitu :

### **A. PERENCANAAN**

1. Apa logistik Pemilu/Pemilihan itu?
2. Apa saja jenis logistik Pemilu/Pemilihan?
3. Apa saja langkah-langkah dalam menghitung kebutuhan Logistik ?
4. Data-data apa saja yang diperlukan dalam menghitung kebutuhan Logistik ?
5. Bagaimana rumus untuk menghitung kebutuhan logistik ?
6. Kapan Logistik harus sudah direncanakan?
7. Bagaimana cara melakukan kegiatan pengolahan data kebutuhan logistik?
8. Untuk siapa dan untuk apa logistik tersebut?

### **B. PENGADAAN**

#### **B.1. ORGANISASI PENGADAAN**

1. Bagaimana organisasi pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui penyedia barang/jasa?
2. Kapan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat sebagaimana disebut pada nomor 1 di atas?

#### **B.2. TUGAS POKOK, KEWENANGAN DAN PERSYARATAN**

1. Apa saja tugas pokok dan kewenangan PA/KPA dalam pengadaan logistik?
2. Apa boleh KPA merangkap sebagai PPK ?
3. Apa saja tugas pokok dan kewenangan PPK?
4. Apa persyaratan seseorang untuk diangkat sebagai PPK?
5. Apa tugas pokok dan kewenangan Pokja ULP?
6. Apa syarat menjadi Pokja ULP?
7. Apa tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan?
8. Apa syarat menjadi Pejabat Pengadaan?
9. Bolehkah Pejabat Pengadaan merangkap sebagai anggota Pokja ULP ?
10. Bolehkah Kepala ULP dan anggota Pokja ULP merangkap sebagai Pengelola Keuangan?
11. Apa tugas pokok dan kewenangan Pejabat Penerima hasil pekerjaan (PPHP)?
12. Bolehkah PPHP merangkap menjadi Anggota Pokja ULP/Pejabat Pengadaan?

**B.3. RENCANA UMUM PENGADAAN**

1. Kapan RUP diumumkan?
2. Siapa yang harus mengumumkan RUP?
3. Apa yang dimuat dalam Pengumuman RUP?
4. Dimana RUP diumumkan?
5. Apakah semua pengadaan misalnya pengadaan ATK dengan nilai di bawah Rp.50 juta harus diumumkan dalam SiRUP ?

**B.4. PEMAKETAN PEKERJAAN**

1. Siapa yang berwenang menetapkan pemaketan pekerjaan?
2. Bagaimana menyusun paket pengadaan?
3. Apakah pengadaan dan pemasangan Baliho atau spanduk dapat dipisah menjadi dua paket pekerjaan ?

**B.5. PENYUSUNAN SPESIFIKASI BARANG DAN HPS**

1. Bagaimana menyusun spesifikasi barang?
2. Apa saja larangan dalam menetapkan spesifikasi teknis barang ?
3. Bagaimana cara menyusun HPS?
4. Apa saja sumber data untuk penyusunan HPS?
5. Komponen apa saja yang diperhitungkan dalam penyusunan HPS?

**B.6. PERSIAPAN PROSES PENGADAAN**

1. Bagaimana cara pemilihan penyedia barang/jasa keperluan Pemilu Pemilihan?
2. Apa saja yang harus diperhatikan dalam menyusun jadwal pengadaan?
3. Bagaimana menyusun dokumen pengadaan ?
4. Bagaimana menyusun persyaratan peserta pengadaan ?

**B.7. LPSE**

1. Untuk apa KPU membentuk LPSE?
2. Apa fungsi LPSE KPU
3. Dimana satker dapat mengakses LPSE KPU

**B.8. e-Tendering**

1. Sebutkan ruang lingkup e-Tendering?
2. Siapa saja yang terlibat dalam e-Tendering?
3. Siapa yang menyelenggarakan e-Tendering?
4. Siapa yang menggunakan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik?

5. Apa ketentuan dalam pelaksanaan e-Tendering?
6. Bagaimana cara pelaksanaan e-Tendering melalui lelang cepat dengan memanfaatkan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa (SIKAP)?
7. Apa tahapan pelaksanaan e-Tendering dengan lelang cepat?

#### **B.8. e-Purchasing dan e-Catalogue**

1. Apa yang dimaksud dengan e-Purchasing?
2. Apa yang dimaksud dengan e-Catalogue?
3. Siapa yang menetapkan barang/jasa yang dicantumkan dalam katalog elektronik?
4. Apakah K/L/D/I wajib melakukan e-Purchasing terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik ?
6. Apa ketentuan pengecualian kewajiban untuk melakukan e-Purchasing?
7. Dalam hal apa ketentuan tersebut pada angka 5 huruf c sampai dengan huruf h berlaku?
8. Sebutkan cara melakukan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara e-Purchasing, apabila aplikasi e-Purchasing mengalami kendala operasional yang menyebabkan aplikasi tersebut belum/tidak dapat dipergunakan?
9. Apa saja tanda bukti perjanjian pada e-Purchasing?
10. Apa yang harus dilakukan apabila barang/jasa tidak ada di dalam e-Catalogue saat proses pengadaan barang/jasa sedang berlangsung ?
11. Bagaimana pelaksanaan e-Purchasing bila dalam satu paket pengadaan barang/jasa terdapat sebagian atau beberapa barang/jasa telah tercantum di dalam e-Catalogue?
12. Bagaimana cara pengadaan barang/jasa melalui e-Catalogue?

#### **B.9. PENGAWASAN PROSES PRODUKSI, PENGEPAKAN, PENYIMPANAN DAN DISTRIBUSI**

1. Apa yang harus dilakukan dalam pengawasan pencetakan dan pendistribusian surat suara Pemilu/Pemilihan?
2. Apa yang harus disiapkan pengawas dalam pengawasan percetakan surat suara?
3. Apa langkah-langkah kerja dalam proses pengawasan percetakan surat suara?
4. Apa saja yang harus diawasi terkait persyaratan gudang perusahaan percetakan tempat penyimpanan hasil cetak surat suara ?
5. Bagaimana mekanisme penyimpanan hasil cetak surat suara?
6. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengepakan hasil cetak surat suara di Penyedia?



7. Berita Acara apa saja yang harus ditandatangani oleh Tim pengawas selama pengawasan cetak surat suara?
8. Hal-hal apa saja yang perlu segera dilaporkan kepada KPU apabila terdapat hal-hal yang dapat menghambat proses produksi?
9. Apa saja yang perlu dilakukan Pengawas dalam pengawasan pencetakan surat suara?
10. Apa saja yang disampaikan Pengawas kepada KPU pada tahap pelaporan pengawasan pencetakan dan pendistribusian surat suara ?
11. Apa saja hak pengawas pencetakan dan pendistribusian surat suara Pemilu/Pemilihan ?
12. Apa saja kewajiban pengawas pencetakan dan pendistribusian surat suara Pemilu/Pemilihan?
13. Apa saja larangan bagi Pengawas pencetakan dan pendistribusian surat suara Pemilu/Pemilihan?
14. Apa sanksi yang akan dikenakan kepada Pengawas percetakan surat suara apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan?
15. Apa saja yang harus dilaporkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota kepada KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh terkait dengan surat suara yang diterima dari perusahaan ekspedisi?

### **C. PEMELIHARAAN**

1. Siapa yang harus menerima Logistik dari penyedia?
2. Apa yang harus dilakukan oleh penerima barang atau PPHP?
3. Bagaimana langkah-langkah setelah Logistik diterima?
4. Bagaimana mekanisme memenuhi kekurangan Logistik?
5. Bagaimana solusi apabila penerimaan Logistik tidak tepat waktu dan jumlah?

#### **C.1. PENGEPAKAN**

1. Siapa saja yang dilibatkan dalam proses sortir, lipat, setting dan hitung logistik?
2. Bagaimana cara melakukan perekrutan personil untuk proses sortir, lipat, setting dan hitung logistik?

KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan melalui swakelola dengan bekerjasama dengan masyarakat.

3. Apa syarat-syarat masyarakat umum yang dilibatkan dalam sortir, lipat, setting dan hitung logistik?
4. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam proses pensortiran dan pelipatan surat suara Pemilu/Pemilihan di Gudang KPU/KIP Kabupaten/Kota ?
5. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam proses pengepakan logistik Pemilu/Pemilihan di Gudang KPU/KIP Kabupaten/Kota ?
6. Barang apa yang harus masuk dalam kotak suara?
7. Barang apa yang di luar kotak suara?

## **C.2. PENYIMPANAN**

1. Kegiatan apa saja yang dilakukan selama penyimpanan logistik Pemilu/Pemilihan di Gudang KPU/KIP Kabupaten/Kota ?
2. Bagaimana pengaturan ruang penyimpanan logistik agar barang logistik tidak rusak dan akses penerimaan dan pengeluaran logistik mudah dilakukan?
4. Apa yang harus dilakukan selama logistik disimpan di gudang?

## **D. PENDISTRIBUSIAN**

1. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan sebelum barang dikirim ke Badan Penyelenggara ad-hoc?
2. Data yang diperlukan sebelum pengiriman logistik?
3. Bagaimana cara menentukan skala prioritas daerah pengiriman Logistik?
4. Bagaimana kotak suara yang sudah terisi logistik dipastikan dalam proses pengiriman tidak tertukar atau salah kirim antar masing-masing TPS?
5. Apa tugas PPK dalam penerimaan/pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan ?
6. Apa tugas masing-masing badan penyelenggara ad hoc setelah menerima logistik?
7. Apa yang harus diperhatikan PPK dalam menyalurkan logistik Pemilu/Pemilihan?
8. Apa Tugas PPS dalam penerimaan/pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan?
9. Apa tugas KPPS dalam penerimaan/pengiriman logistik?
10. Bagaimana proses penyerahan dan penerimaan barang logistik Pemilu/Pemilihan?
11. Apa saja yang harus diperhatikan dalam penerimaan logistik pemilu?
12. Bagaimana memonitor pengiriman logistik? Langkah-langkah memonitor pengiriman logistik?

### **E. PENGELOLAAN PASCA PEMILU**

1. Bagaimana mengelola barang Pasca Pemilu/Pemilihan?
2. Jenis logistik apa yang harus disimpan pasca Pemilu/Pemilihan?
3. Bagaimana solusinya apabila KPU Kabupaten/Kota tidak memiliki gudang atau gudang yang dimiliki tidak memadai untuk menyimpan arsip logistik pasca Pemilu/Pemilihan?
4. Berapa Kali KPU Kabupaten/Kota melaksanakan inventarisasi pemeriksaan fisik (stock opname) terhadap kotak dan bilik suara berbahan alumunium?
5. Bagaimana mekanisme penghapusan jika terdapat logistik rusak berat seperti kotak dan bilik suara berbahan alumunium karena bencana alam atau hal lain?
6. Bagaimana mekanisme usul ijin penghapusan/pemusnahan barang logistik pasca Pemilu/Pemilihan kepada Kepala ANRI ?
7. Apa proses selanjutnya, setelah logistik pasca Pemilu/Pemilihan mendapatkan ijin dari ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia), dan bagaimana proses selajutnya untuk pelaksanaan penghapusan/pemusnahan Logistik pasca Pemilu/Pemilihan?
8. Apa yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota apabila dalam pelaksanaan penghapusan dengan mekanisme penjualan barang, logistik tidak laku terjual?
9. Apakah penghapusan barang logistik pasca Pemilu/Pemilihan harus melalui penjualan secara lelang?
10. Apa yang harus diperhatikan apabila logistik Pemilu/Pemilihan akan dimusnahkan?

### **KESIMPULAN**

1. Pengelolaan logistik Pemilu secara esensial berjalan secara terstruktur, sistematis, diiringi kualitas tata kelola logistik yang terukur baik dalam manajemen perencanaan kebutuhan logistik; pengadaan berbagai sarana dan prasarana logistik; pemeliharaan seluruh material logistik; pendistribusian logistik dari pusat hingga ke titik terakhir Tempat Pemungutan Suara; sampai pada pengelolaan dan penanganan barang logistik pasca pelaksanaan Pemilu selesai.
2. Diperlukan suatu metode pengelolaan logistik Pemilu secara esensial, efisien dan efektif agar pengelolaan rantai pasokan logistik Pemilu secara kualitatif dapat memberikan gambaran penanganan berbagai masalah tata kelola logistik Pemilu secara rinci dan menyeluruh.

3. Pelaksanaan pengelolaan logistik Pemilu berbasis kompetensi SDM pengelola dan pelaksana logistik Pemilu dalam upaya memastikan bahwa rangkaian aktivitas perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pendistribusian logistik Pemilu hingga pengelolaan logistik pasca Pemilu dapat ditangani oleh SDM KPU yang berkualitas sesuai kompetensinya masing-masing di berbagai level manajemen KPU.

### **Saran**

1. Pentingnya supervisi/pengawasan yang lebih detail dan komprehensif dalam implementasi Pengelolaan logistik Pemilu agar segala keluhan akibat kesalahan penanganan logistik dapat dihindari secara cermat dan tuntas. Sehingga dapat dipastikan kualitas tata kelola logistik yang terukur baik dalam manajemen perencanaan kebutuhan logistik; pengadaan berbagai sarana dan prasarana logistik; pemeliharaan seluruh material logistik; pendistribusian logistik dari pusat hingga ke titik terakhir Tempat Pemungutan Suara; sampai pada pengelolaan dan penanganan barang logistik pasca pelaksanaan Pemilu selesai berjalan dengan baik sesuai rencana : tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu.
2. Pentingnya keberadaan model/metode pengelolaan logistik Pemilu secara esensial, efektif dan efisien agar pengelolaan rantai pasokan logistik Pemilu secara kualitatif dapat memberikan gambaran penanganan berbagai masalah tata kelola logistik Pemilu secara rinci dan menyeluruh.
3. Pentingnya pengembangan kompetensi SDM pengelola dan pelaksana logistik Pemilu berupa Bimbingan Teknis pada berbagai tingkat satuan tugas KPU perlu direncanakan dan dilaksanakan dengan rinci, jelas dan serius serta terstruktur, dalam upaya memastikan bahwa rangkaian aktivitas perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pendistribusian logistik Pemilu hingga pengelolaan logistik pasca Pemilu dapat ditangani oleh SDM KPU yang berkualitas sesuai kompetensinya masing-masing di berbagai level manajemen KPU.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Assauri, Sofjan. 2004. Manajemen Pemasaran . Jakarta: Rajawali Press.
- Basu Swastha.2002. Manajemen Pemasaran. Edisi Kedua. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Penerbit Liberty.

Chopra, S., and Meindl, P. (2001). Supply chain management: Strategy, planning, and operations. New Jersey–Prentice Hall.

Kalakota, Ravi & Marcia Robinson. (2001). E-Business 2.0. Roadmap for Success. Addison-Wesley. USA.

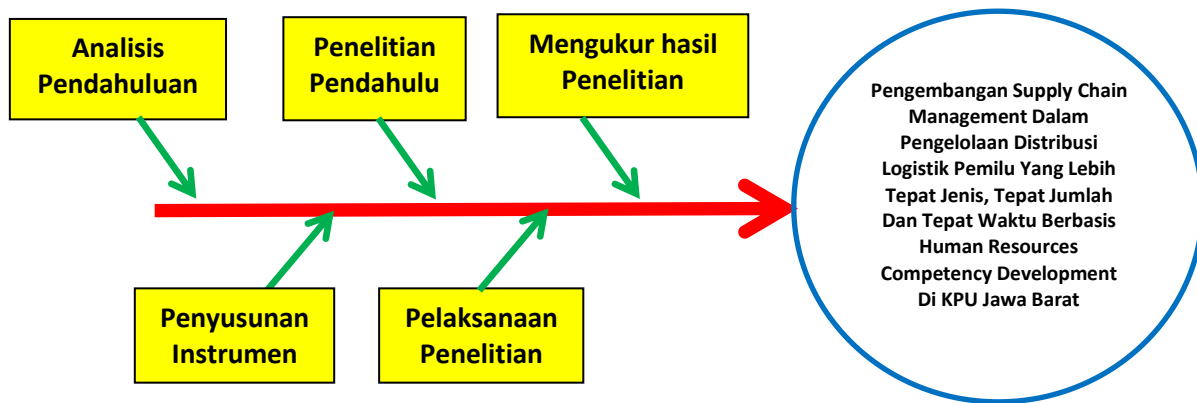
Turban, Rainer, Porter. (2004). Information technology for management 4th edition. John Wiley & Sons, Inc.

Sasangka, I., & Zulkarnaen, W. (2019). Pengembangan Model Seleksi Dalam Upaya Membentuk Integritas & Independensi Anggota Kpu Kabupaten/Kota. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 3(1), 95-115.

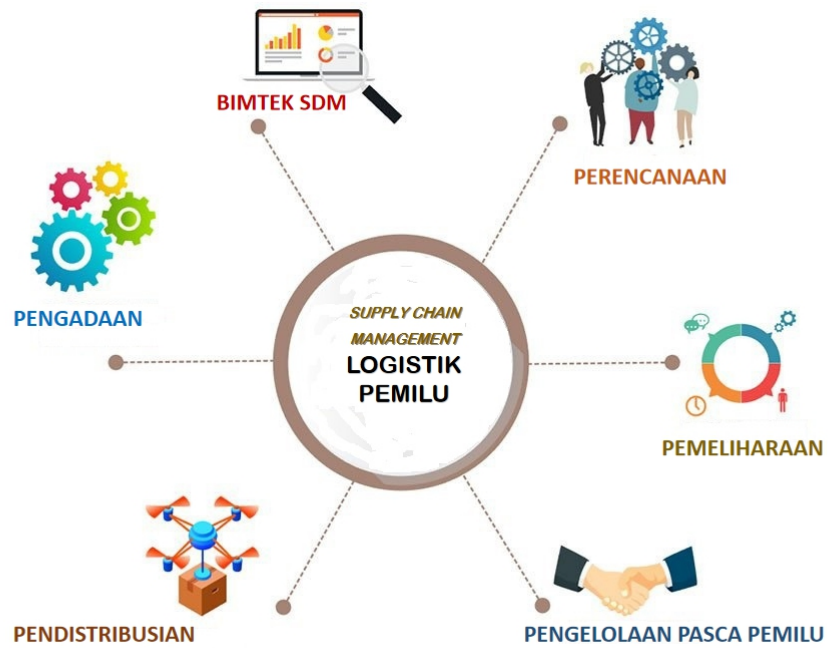
Soekartawi, 2001. Pengantar Agroindustri. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Spencer, Lyle & Signe M. Spencer. 1993. Competence at Work, Models For Superior Performance. Canada : John Wiley & Sons, Inc

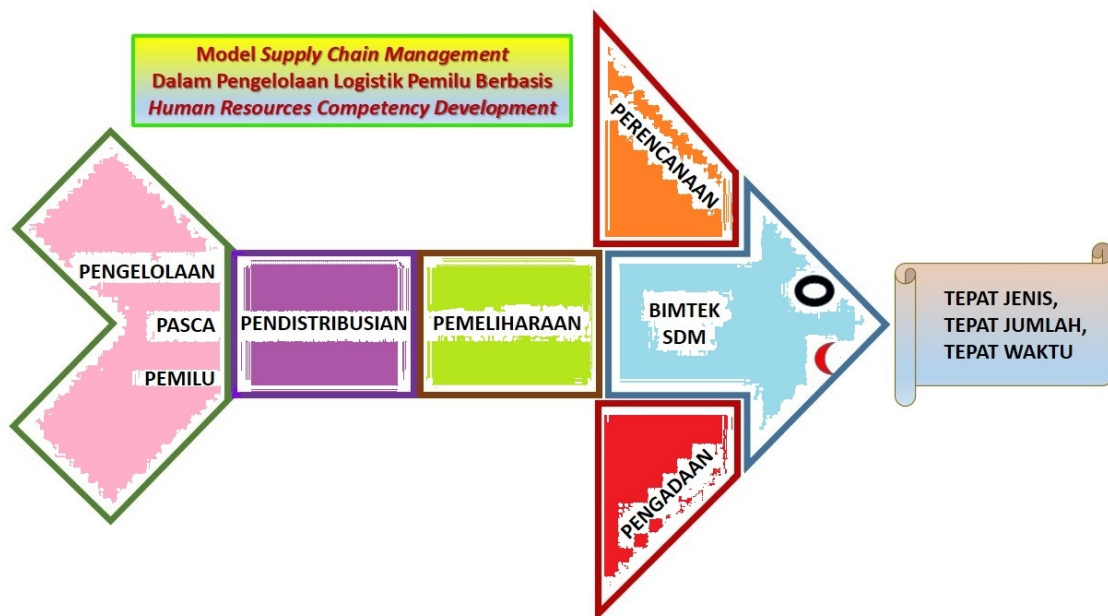
**GAMBAR**



**Gambar 1. Diagram Alir Penelitian**



Gambar 2. Identifikasi Komponen Rantai Pasok Logistik Pemilu



Gambar 3. Model Manajemen Rantai Pasok Logistik Pemilu berbasis Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia